

PENGARUH PERTAMINA TERHADAP MASYARAKAT KOTA BALIKPAPAN 1957-1975

Oleh
Amanda Liony dan Ririn Darini, M. Hum

ABSTRAK

Perkembangan Pertamina dalam perjalanan sejarah pembangunan nasional memiliki peranan penting dan strategis. Selain menguasai hajat hidup orang banyak, migas merupakan sumber energi bagi kegiatan ekonomi nasional karena migas berkontribusi dalam penerimaan devisa negara pada masa awal pembangunan nasional. Terbentuknya Pertamina berawal dari perusahaan minyak Belanda, yaitu BPM. Tujuan penelitian ini adalah ingin mengetahui bagaimana dinamika Pertamina setelah proses nasionalisasi, serta memahami pengaruh Pertamina terhadap masyarakat kota Balikpapan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis. **Pertama**, heuristik yang merupakan tahap pengumpulan data atau sumber-sumber sejarah yang relevan. **Kedua** kritik sumber, merupakan tahap pengkajian terhadap otentisitas dan kredibilitas sumber-sumber yang diperoleh yaitu dari segi fisik dan isi sumber. **Ketiga**, interpretasi yaitu dengan mencari keterkaitan makna yang berhubungan antara fakta-fakta yang telah diperoleh sehingga lebih bermakna. **Keempat**, historiografi yaitu penyampaian sintesis dalam bentuk karya sejarah.

Pertamina di Balikpapan mulai berkembang pasca nasionalisasi yang dilakukan pada tahun 1965. Serah terima aset antara pemerintah Indonesia dan manajemen BPM/Shell Indonesia menandakan berakhirnya kegiatan operasi BPM/Shell di Indonesia. Dengan perjanjian tersebut, aset BPM/Shell Indonesia berupa kilang minyak di Balikpapan menjadi milik Indonesia. Kilang minyak Pertamina UP V Balikpapan, yang terletak di tepi teluk Balikpapan memiliki struktur organisasi yang stafnya dibagi atas cabang berdasarkan wilayah kerjanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertamina belum berpengaruh besar pada keadaan sosial-ekonomi Kota Balikpapan. Munculnya arus migrasi yang ada hanya karena faktor masih banyaknya lapangan kerja yang tersedia, kemudian faktor mengikuti keluarga yang sebelumnya tinggal dan menetap di Kota Balikpapan. Walau kebutuhan akan pegawai besar, namun masyarakat yang ingin bekerja sebagai buruh minyak pun harus mengikuti pendidikan yang disediakan oleh Pertamina, maka kegiatan ekonomi dan lapangan pekerjaan yang besar di Kota Balikpapan adalah dalam bidang pertanian/perkebunan, dan perdagangan. Pertamina pun juga bekerja sama dengan pemerintah kota untuk mengelola air bersih sebagai kebutuhan masyarakat kota.

Kata Kunci : *Pertamina, masyarakat, Kota Balikpapan*

A. Latar Belakang

Pertamina merupakan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara yang menyediakan pelayanan jasa kepada masyarakat. Sebagai salah satu BUMN (Badan Usaha Milik Negara) yang mengemban misi penting dan strategis dalam pembangunan sektor migas. Selama beberapa dasawarsa merupakan aktor tunggal dalam mengelola kekayaan migas dan menjamin ketersediaan sumber energi khususnya BBM (Bahan Bakar Minyak). Meskipun peran itu sebagian telah diambil kembali oleh pemerintah melalui UU No. 22/2001 yang membuka kesempatan bagi pelaku bisnis untuk berkiprah dalam bisnis migas nasional, Pertamina masih dianggap dan diharapkan menjadi perusahaan migas utama dalam pembangunan sektor migas nasional.¹

Pengelolaan minyak bumi secara nasional tidak dapat dilepaskan dari perjalanan bangsa, sejak masa pendudukan Belanda hingga masa kemerdekaan. Berdasarkan catatan sejarah, pengelolaan minyak bumi di Indonesia termasuk yang tertua di dunia. Usaha pengeboran minyak bumi pertama kali di Indonesia dilakukan di Cibodas oleh Reerink pada tahun 1871, atau 12 tahun setelah pengeboran minyak bumi pertama dunia di Pennsylvania.² Pada tahun 1883, Aeilko Ziljker, pimpinan perkebunan tembakau Hindia Belanda wilayah Langkat, Sumatera Utara secara tak sengaja menemukan minyak bumi, namun setelah dilakukan pengeboran tidak menghasilkan minyak bumi. Dua tahun kemudian tepatnya 1885 Ziljker berhasil menemukan minyak yang dapat dikelola secara komersial setelah membangun sumur kedua di Telaga Tunggal. Sejak itu, pencarian minyak bumi diteruskan ke berbagai wilayah nusantara seperti Surabaya, Jambi, Perlak, Palembang, dan Kalimantan Timur.

¹ Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, (Yogyakarta: Galang Press Group, 2000), hlm. 9.

² Anderson G. Bartlett dkk, *PERTAMINA: Perusahaan Minyak Nasional*, terj. Mara Karma, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1986), hlm 44.

Pada 1890 di Negeri Belanda didirikan *N.V. Koninklijk Nederlandsche Maatschappij tot exploitatie van Petroleumbronnen in Nedrlandsche Indie*. Sejak awal berdirinya, perusahaan ini berusaha untuk menyatukan perusahaan-perusahaan yang bergerak dibidang permifyakan. Mereka berniat membangun korporasi permifyakan besar. Sampai dengan 1939, terdapat 12 wilayah di nusantara yang menghasilkan minyak bumi, yaitu Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, Kalimantan Timur (Kutai), Jawa Barat, Sumatera Utara, Irian Jaya (Selawati), Jawa Timur, Kalimantan Selatan (Barito), Natuna Barat, Bula (Pulau Seram), dan Bintuni.

Kotamadya Balikpapan, merupakan salah satu kota yang berada di provinsi Kalimantan Timur yang secara historis administrasi pemerintahannya telah ada sejak masa pemerintahan Belanda. Kelahiran Balikpapan, juga tidak jauh dari kelahiran sebuah kongsi dagang besar bernama *De Bataafsche Petroleum Maatshappij NV* (BPM).³ Pada tahun 1919 Balikpapan sudah menjadi lokasi perindustrian pengolahan minyak yang dipegang oleh BPM.⁴ Pembangunan infrastruktur oleh BPM berupa jalan, jaringan pipa minyak, fasilitas pergudangan, pemukiman pekerja, serta pembangunan stasiun serta perluasan jaringan kabel telegram antara Balikpapan hingga Tarakan. Pembangunan infrastruktur tersebut telah menunjukkan, bahwa terjadi perkembangan ekonomi di Balikpapan akibat adanya industri minyak. Untuk menjalankan industri minyak di Balikpapan, BPM mendatangkan kuli-kuli kontrak yang berasal dari Jawa dan buruh-buruh Tionghoa.⁵

³ Orang-orang selama beberapa dekade menyebutnya BPM. Merupakan anak perusahaan gabungan antara Royal Dutch dan Shell Companies, yang segera terkenal di seluruh dunia dengan nama Shell.

⁴ Tim Penyusun, *Kalimantan Timur: Profil Provinsi Republik Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Bakti Nusantara, 1994), hlm. 23.

⁵ Akhmad Ryan, *Industri Minyak Balikpapan: Dalam Dinamika Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi*, (Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012),hlm. 7.

Proses perundingan Irian Barat yang mengalami kebuntuan, menimbulkan sentimen anti Belanda yang luas dikalangan masyarakat. Industri minyak juga mendapatkan sorotan untuk dilakukannya nasionalisasi terhadap BPM. Proses nasionalisasi tidak dilakukan secara langsung, namun BPM mulai melakukan proses Indonesianisasi terhadap pegawainya dengan merekrut banyak tenaga Indonesia. Perundingan yang sulit terjadi selama bertahun-tahun dengan pemerintah Indonesia, dan proses nasionalisasi di Balikpapan baru terjadi pada awal tahun 1966 setelah BPM mendapat tekanan berat oleh tindakan represif dari para buruh minyak yang di koordinasikan oleh PERBUM (Persatuan Buruh Minyak) tahun 1963-1965.⁶

Kondisi politik Indonesia yang tidak menentu setelah Gestapu 1965 dan kerugian terus menerus yang dialami BPM membuat perusahaan ini memutuskan untuk menjual asset-asetnya. Penjualan ditandai dengan penandatanganan serah terima aset-aset Shell Indonesia (BPM) kepada pemerintah RI, tanggal 31 Desember 1965. Pihak Shell diwakili oleh Van Reeven dan Indonesia diwakili oleh Ibnu Sutowo. Perjanjian tersebut menandai berakhirnya operasi kilang minyak BPM Balikpapan di Indonesia, yang telah berlangsung lebih dari enam dekade.⁷

Penulisan sejarah membutuhkan adanya sumber-sumber sejarah yang relevan. Sumber-sumber tersebut berisikan data dan informasi seputar peristiwa terkait. Menurut Louis Gottschalk, historiografi adalah rekonstruksi yang imajinatif melalui proses pengkajian dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Penggunaan historiografi yang relevan merupakan salah satu tahapan pokok dalam penulisan karya sejarah.⁸ Adapun Historiografi yang digunakan dalam skripsi ini sebagai berikut. Pertama, skripsi yang berjudul *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan*

⁶ Anderson G. Bartlett dkk, op. cit., hlm 206.

⁷ *Ibid.*

⁸ Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985), hlm. 32.

Pertamina 1968-1976 oleh Sri Waryanti mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gajah Mada tahun 1992. Dalam skripsi ini penulis membahas Pertamina pasca dilebur menjadi perusahaan milik negara, seperti dinamika yang terjadi didalamnya. Penulis dalam penelitian ini memusatkan Pertamina secara umum atau nasional. Kedua, skripsi mahasiswa prodi Ilmu Sejarah, dari Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Djoko Prasetyo yang berjudul *Perkembangan Perusahaan Tambang Minyak dan Gas Bumi (Pertamina) 1968-1975 Isu-Isu Korupsi*. Skripsi ini mengangkat dugaan adanya penyelewengan yang terjadi dalam tubuh Pertamina, akibat kurangnya pengawasan dari instansi terkait.

Historiografi relevan yang terakhir adalah skripsi Satria Permana mahasiswa Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, *Badai di Tengah Oil Boom: Krisis Manajemen Keuangan Pertamina 1974-1975*. Adanya kesalahan manajemen dalam tubuh Pertamina menyebabkan BUMN ini menjadi jatuh dalam timbunan hutang, sehingga negara harus menanggung beban hutang yang tinggi akibat krisis dalam tubuh Pertamina dan menyebabkan pertumbuhan ekonomi Indonesia terhambat.

Metode adalah cara, jalan, atau petunjuk pelaksanaan atau petunjuk teknis. Sedangkan penelitian berarti penyelidikan yang seksama dan teliti terhadap suatu objek untuk menemukan fakta-fakta guna menghasilkan produk baru, memecahkan suatu masalah, atau untuk menyokong atau menolak suatu teori. Metode penelitian yang dimaksud adalah mengumpulkan, menguji dan menganalisa sumber-sumber yang tersedia. Menurut Louis Gottschalk ada empat prosedur dalam proses penelitian sejarah yaitu: pengumpulan data (heuristik), kritik sumber (verifikasi), penafsiran (interpretasi), dan penulisan (historiografi).⁹ Pendekatan-pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan sosiologis, dan pendekatan ekonomi

⁹ Nugroho Notosusanto, *Norma-norma dan penulisan Sejarah*, (Jakarta: Depankam,1997), hlm. 19.

B. Gambaran Umum Wilayah Balikpapan

1. Letak dan Kondisi Geografis

Nama Balikpapan tidak diketahui asal dan makna yang jelas, menilik susunan katanya dapat dimasukkan ke dalam asal kata bahasa Melayu. Disebutkan suatu daerah di hulu sungai di sebuah Teluk sekitar tiga mil dari pantai, desa itu bernama “Bilipapan”. Menurut cerita, nama Balikpapan berasal dari sebuah peristiwa mengenai adanya sepuluh keping papan yang kembali ke sebuah wilayah bernama Jenebora. Dari 1000 keping papan yang diminta oleh Sultan Muhammad Idris, Sultan Kutai pada masa itu, sebagai sumbangan bahan bangunan untuk pembangunan istana baru di Kutai Lama. Kesepuluh papan yang kembali, dianggap masyarakat sekitar sebagai papan yang tidak mau ikut disumbangkan, maka orang Kutai menyebutnya dengan *Baliklah-papan Tu*. Sehingga wilayah sepanjang teluk tepatnya di wilayah Jenebora disebut Balikpapan.¹⁰

Kotamadya Balikpapan memiliki luas wilayah kurang lebih 50.330,57 ha atau sekitar 503,3 km², dan luas pengelolaan laut mencapai 160,10 km², dengan batas-batas wilayah kota Balikpapan yaitu, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara, sebelah timur dan selatan berhadapan langsung dengan Selat Makasar, kemudian sebelah barat berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Kabupaten Pasir.¹¹

Secara umum ketinggian kota Balikpapan antara 0 meter sampai 100 meter di bawah permukaan laut.¹² Ketinggian 0-10 mdpl memiliki luas 6.980,00 ha atau 13 % dari wilayah kota Balikpapan. Ketinggian >10-20 mdpl memiliki luas 17.260,00 ha, sedangkan ketinggian >20-100 mdpl

¹⁰ Amiruddin Maula, *Cerita Rakyat Dari Kalimantan Timur*, (Jakarta: Grasindo, 1994), hlm. 9.

¹¹ Penerbit Buku Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*, (Jakarta: Kompas, 2003), hlm. 448.

¹² M. Mahyuzar, *Administrasi, Transportasi, dan Pusat Perdagangan: SDA dan Sosial Budaya Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur*, (Semarang: Penerbit Aneka Ilmu 2009), hlm. 10.

memiliki luas sebesar 26.090,57 ha.¹³ Keadaan topografi kota Balikpapan adalah sekitar 85% daerah berbukit dan hanya sekitar 15% daerah datar yang sempit dan terletak di daerah sepanjang pantai. Struktur tanah di kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa.

Topografi kota Balikpapan yang sebagian besar adalah berbukit berada di bagian utara seperti, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Timur. Daerah ini dijadikan sebagai tempat penyangga kota, di antaranya hutan lindung kota di Kecamatan Balikpapan Selatan, lokasi konservasi alam di Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan serta hutan lindung Sungai Wain di wilayah Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat. Bagian selatan, tepatnya di sepanjang Teluk Balikpapan, terbentang dataran landai di Kecamatan Balikpapan Selatan dan Tengah. Kegiatan perekonomian Kota Balikpapan berpusat di daerah ini, bahkan industri pengolahan terutama minyak dan gas bumi terkonsentrasi di wilayah ini.¹⁴

Kondisi geografis pantai yang landai serta berada di dalam teluk dengan ombak yang tidak terlalu besar merupakan syarat untuk mengembangkan sebuah pelabuhan alam. Sejak terdapat usaha untuk melakukan pengeboran minyak pertama tahun 1897, maka untuk menampung minyak bumi tersebut didirikan depot penyimpanan di sekitar wilayah pantai teluk Balikpapan.¹⁵

2. Keadaan Administratif

a) Masa Pemerintahan Kolonial

Dalam kontrak politik yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda dengan Kesultanan Kutai, maka secara administrasi Balikpapan masuk dalam Karesidenan *Zuider en Oosterafdeling van Borneo* dengan pusat

¹³ Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, *Balikpapan Dalam Angka 2012*, (Balikpapan: Bappeda Balikpapan, 2012), hlm. 2.

¹⁴ Penerbit Buku Kompas, *op. cit.*, hlm. 449.

¹⁵ Akhmad Ryan, *op. cit.*, hlm. 27.

pemerintahan yang terletak di Banjarmasin.¹⁶ Sebagai bagian daerah dari Kesultanan Kutai di sebelah selatan, maka Balikpapan diberikan status sebagai distrik dan dikepalai oleh seorang kepala distrik yang disebut *districtchoofd. Controleur* yang ditempatkan di Balikpapan juga merangkap sebagai *Hoofd van Plaatselijk Bestuur* (Kepala Pemerintahan Setempat/Lokal). Sebelum *controleur* memerintah, wilayah Balikpapan diperintah oleh seorang *Gezaghebber* yaitu komendur laut yang merangkap jabatan sebagai kepala pemerintahan setempat.¹⁷

Wilayah Balikpapan dibagi ke dalam beberapa wilayah perkampungan yang masing-masing dipimpin oleh kepala kampung oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembagian ini bertujuan untuk memudahkan pengontrolan serta pengawasan kampung. Pada tahun 1920 di Balikpapan hanya terdapat lima kampung, yaitu:¹⁸

1. Kampung Baru meliputi wilayah Kampung Baru yang sekarang hingga Balikpapan Seberang (sekarang Kabupaten Penajam Paser Utara).
2. Kampung Karang Anyar daerahnya meliputi Rapak hingga Gunung Sari Ulu.
3. Kampung Klandasan Ilir meliputi kawasan Klandasan sampai Manggar.
4. Kampung Klandasan Ulu meliputi Klandasan Ulu hingga daerah sekitar Melawai.
5. Kampung Prapatan meliputi Prapatan sampai Gunung Sari Ilir.

Pada masa pendudukan Jepang, Balikpapan juga dijadikan sebagai pusat pemerintahan bagi militer Angkatan Laut Jepang untuk seluruh Kalimantan. Wilayah ini disebut *Borneo Kaigun Minseibu* dengan pusatnya

¹⁶ Kontrak politik antara pemerintah kolonial Belanda dengan Kesultanan Kutai tercatat bahwa wilayah Balikpapan merupakan bagian dalam wilayah Kesultanan Kutai. Lihat Akhmad Ryan, *op. cit.*, hlm. 21.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 22.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 23.

di Makasar yang dipimpin Laksamana Maeda.¹⁹ Menyerahnya Jepang di Balikpapan pada tahun 1945 oleh tentara Australia membuat pemerintahan diambil alih untuk sementara, dan setelah itu diserahkan kembali kepada *Netherlands Indies Civil Administration* (NICA).

b) Masa Pasca Kemerdekaan

Setelah Kalimantan Timur bergabung dengan Republik Indonesia pada 24 Maret 1950, masih banyak masalah administrasi yang muncul dalam beberapa wilayah di Kalimantan Timur, khususnya Balikpapan. Berdasarkan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, Balikpapan termasuk dalam Daerah Istimewa Kutai.²⁰ Balikpapan termasuk dalam Kawedanan Kutai Selatan yang terdiri atas Kecamatan Balikpapan, Kecamatan Balikpapan Seberang, dan Kecamatan Samboja. Awal tahun 1950 sebagian rakyat Kalimantan Timur menginginkan agar daerah swapraja di Kalimantan Timur dihapuskan. Tidak adanya kemajuan ekonomi dan pemerintahan menjadi alasan rakyat Kalimantan Timur menuntut segera dibentuknya dua kota strategis yaitu Balikpapan dan Samarinda. DPRD Kalimantan Timur dengan surat keputusan tanggal 11 Maret 1957 menuntut kepada pemerintah pusat untuk mengangkat status Kota Balikpapan dan Samarinda agar dijadikan Kotapraja (Daerah Tingkat II), namun tuntutan tersebut tidak segera dipenuhi.²¹

Tuntutan yang tak dipenuhi, membuat DPRD Tingkat I Kalimantan Timur mengeluarkan sebuah resolusi tanggal 25 Februari 1959 dengan No. Res/3/DP-RD.1/59 yang isinya mendesak pemerintah pusat untuk segera membuat undang-undang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Dalam Undang-Undang Darurat 1953 terdapat beberapa daerah istimewa di Kalimantan Timur yang dianggap setingkat kabupaten, yaitu Daerah Istimewa Kutai, Daerah Istimewa Berau, dan Daerah Istimewa Bulungan. Lihat Humas Kota Balikpapan, *90 Tahun Kota Balikpapan*, (Balikpapan: Humas Kota Balikpapan, 1987), hlm. 84.

²¹ Akhmad Ryan, *op. cit.*, hlm. 24.

Timur. Untuk mempersiapkan pembentukan Kotapraja Balikpapan dan Samarinda, maka dibentuklah Panitia Khusus yang bertugas mempelajari dan menghimpun serta mempersiapkan data-data yang diperlukan.

Pada tanggal 2 Juli 1958 diadakan sidang DPRD Daerah Istimewa Kutai dengan agenda membahas pembentukan Kotapraja Balikpapan dan Samarinda, yang menghasilkan kesepakatan 13 suara setuju dan 3 abstain pada sebuah pemungutan suara. Hasil pemungutan tersebut merupakan suatu persetujuan dari DPRD Daerah Istimewa Kutai atas dibentuknya Kotapraja Balikpapan dan Samarinda. Lahir Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 yang berisi pengurangan wilayah dari Daerah Istimewa Kutai yaitu Balikpapan dan Samarinda.²² Pada 21 Januari 1960 dikeluarkan SK Gubernur Kalimantan Timur No. 20 Tahun 1960, yang menetapkan batas-batas wilayah Kotapraja Balikpapan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 Tahun 1996 Kota Balikpapan terdiri dari 5 kecamatan dan 27 Kelurahan. Namun, pada tahun 2012 terdapat Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kelurahan dalam wilayah Kota Balikpapan, dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan No. 8 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota dalam wilayah Kota Balikpapan.

3. Keadaan Demografis

Demografi adalah ilmu tentang susunan, jumlah dan perkembangan penduduk; ilmu yang memerlukan uraian atau gambaran statistik mengenai suatu bangsa dilihat dari sudut sosial politik, ilmu kependudukan.²³ Menurut Salladien dalam Buku Kependudukan di Indonesia, demografi adalah ilmu pengetahuan yang secara kuantitatif dan kualitatif menganalisa penduduk

²² *Ibid.*

²³ KBBI (Jakarta: Pusat Bahasa Depdiknas, 2008).

mengenai jumlah, struktur, dan perkembangannya karena faktor fertilitas, mortalitas, migrasi dan perubahan status dalam masyarakat.²⁴

Sebelum ditemukannya minyak bumi serta batu bara, Balikpapan merupakan perkampungan nelayan kecil. Namun ketika aktivitas industri minyak mulai berkembang, lonjakan penduduk terjadi di Balikpapan karena faktor migrasi yang tinggi. Para pendatang pada umumnya mengisi aktivitas kota dengan berdagang dan menjadi buruh minyak.²⁵

Tahun 1960 jumlah penduduk Balikpapan bertambah. Ini diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain (1) angka kelahiran lebih besar dari angka kematian, karena adanya kesehatan yang semakin baik; (2) perpindahan penduduk dari tempat lain. Keadaan ini kelihatan jelas sesudah masuknya modal asing dan dalam negeri dalam sektor kehutanan, perminyakan, perikanan; (3) Transmigrasi, oleh pemerintah baik secara umum ataupun spontan sektoral daerah.²⁶

Pada 1961 rata-rata pertumbuhan penduduk sebesar 3,81% pertahun. Data ini menunjukkan adanya penurunan karena terbukanya lahan ekonomi baru di daerah lain. Tahun 1970 jumlah penduduk bertambah menjadi 137.307 orang. Kenaikan jumlah penduduk yang tinggi setelah tahun 1960an juga didukung oleh pembukaan industri-industri di bidang kehutanan yang menyerap banyak buruh. Berikut tabel jumlah penduduk Balikpapan tahun 1964-1971

²⁴ Salladien, *Buku Kependudukan Konsep Dasar Demografi*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hlm. 1.

²⁵ Humas Kota Balikpapan, *op. cit.*, hlm. 45.

²⁶ Research Teknik UGM, *Pelabuhan Balikpapan* (bentuk mikro), (Kompilasi Data; Jakarta: Library of Congress Office; Washington DC: Library of Congress Photoduplication Service, 1990), hlm. 25.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kotamadya Balikpapan 1964-1971

Kecamatan	1964	1965	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Balikpapan Timur	33.713	34.054	35.158	35.413	34.328	40.439	38.055	43.056
Balikpapan Barat	34.069	35.003	28.889	30.441	31.444	-	33.016	38.440
Balikpapan Utara	36.536	38.406	40.381	42.893	44.614	43.779	46.684	45.282
Balikpapan Sebrang	13.324	13.639	13.954	14.290	15.061	-	17.552	18.496
Kodya Balikpapan	117.642	121.102	118.362	123.037	125.447	131.055	135.307	145.274

Sumber: Research Teknik UGM. *Pelabuhan Balikpapan* (bentuk mikro), (Kompilasi Data; Jakarta: Library of Congress Office; Washington DC: Library of Congress Photoduplication Service, 1990), hlm. 26.

4. Keadaan Ekonomi

Dengan kondisi geografis yang tidak terlalu subur, dan memiliki tiga macam jenis tanah, wilayah Balikpapan sebagian berkembang menjadi wilayah yang secara ekonomi mengarah perkebunan. Lahan perkebunan tidak tersebar secara merata di wilayah Balikpapan, sebab masyarakat kota yang juga para pendatang yang mendiami Kota Balikpapan memilih ekonomi perdagangan untuk memenuhi kebutuhan mereka. Adanya kegiatan ekonomi industri pengolahan minyak dan gas bumi menjadikan Kota Balikpapan dijuluki kota minyak. Sebutan ini muncul bukan karena penghasil minyak tetapi sebagai pusat industri pengolahan minyak mentah yang bahan bakunya didatangkan dari daerah sekitar, seperti Kabupaten Kutai Kartanegara, Pasir, dan Kutai Timur bahkan Kalimantan Selatan.²⁷

Selain usaha industri minyak dan gas, roda perekonomian Kota Balikpapan juga berasal dari sektor perdagangan dan sektor transportasi atau

²⁷ Penerbit Buku Kompas, *loc. cit.*

jasa. Hal ini dapat dilihat banyaknya penduduk Balikpapan yang menggantungkan hidupnya pada sektor perdagangan. Selain usaha perdagangan, ekonomi Balikpapan juga digerakkan oleh usaha/industri rumahan yang mempekerjakan ibu-ibu rumah tangga, dan juga anak-anak putus sekolah. Usaha ini merupakan Usaha Kecil Menengah yang didukung langsung oleh pemerintah kota atau langsung bantuan dan kerjasama perusahaan tambang di Kalimantan Timur. Namun, tidak bisa dibantah lagi bahwa realitas industri minyak di Balikpapan adalah motor penggerak awal pertumbuhan perekonomian Balikpapan hingga tahun 1960an.

5. Keadaan Sosial

a) Tenaga Kerja Industri Minyak di Balikpapan

Adanya kebutuhan untuk perluasan dan peningkatan kapasitas produksi pada kilang minyak Balikpapan membuat BPM kembali mendatangkan kuli kontrak dari Jawa. Kondisi ini mempengaruhi komposisi demografi Balikpapan yang pada tahun 1913 penduduknya sebagian besar merupakan buruh kuli kontrak.²⁸ Kondisi sosial tenaga kerja industri minyak sebelum Perang Dunia II hampir sama dengan kebijakan politik rasial yang diterapkan pemerintah kolonial yang membagi masyarakat ke dalam tiga golongan rasial, yaitu pribumi, golongan Eropa, dan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan lain-lain).²⁹

Golongan menengah dalam struktur rasial ialah golongan Timur Asing, golongan elite ialah orang-orang Eropa, dan yang paling bawah adalah orang-orang pribumi. Dalam kondisi tertentu orang-orang pribumi dapat disejajarkan dengan orang Eropa, walaupun posisi mereka di bawah orang Eropa, tetapi posisi mereka sama dengan tenaga kerja Asia dalam struktur tertinggi.³⁰ Untuk dapat melihat perbandingan jumlah tenaga kerja asing dan pribumi dapat dilihat pada tabel dibawah ini

²⁸ Akhmad Ryan, op. cit., hlm. 101.

²⁹ Ongkokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 13.

³⁰ Anderson G. Bartlett, op. cit., hlm. 53.

Tabel 2
Jumlah Presentase Perbandingan Tenaga Kerja Asing dan Pribumi di BPM
Balikpapan

Tahun	Pegawai Asing	Pegawai Pribumi
1950	95%	5%
1958	42%	58%
1959	31%	69%
1960	25%	75%

Sumber: Shell Indonesia. *Pladju: Pusat Kegiatan Minjuk di Sumatera*, (Jakarta: Gita Karya, 1960).

Tabel diatas menunjukkan mulai terjadi peningkatan presentase tenaga kerja pribumi sejak tahun 1958, hal ini diakibatkan adanya situasi politik yang tak menentu di Indonesia. Meskipun dalam struktur ekonomi dan sosial ketenagakerjaan orang pribumi dalam BPM adalah yang paling rendah, mereka tetap mendapatkan pelayanan berupa fasilitas kesehatan secara gratis, itupun jika mereka mendapatkan posisi yang tinggi dalam perusahaan BPM misalnya saja posisi mandor. Mandor pada industri ini cukup sulit dijabat oleh orang-orang pribumi, hal itu dikarenakan mereka tidak memiliki kapabilitas yang dibutuhkan perusahaan.

b) Mobilitas Sosial

Menurut Paul B. Horton dalam bukunya berjudul *The Sociology of Social Problems*,³¹ menyebutkan bahwa mobilitas sosial adalah suatu gerak perpindahan dari satu kelas sosial ke kelas sosial lainnya atau gerak pindah dari strata yang satu ke strata yang lain. Tujuan dari mobilitas sosial penduduk dan tenaga kerja ke pusat-pusat perekonomian untuk mencari pekerjaan di luar sektor pertanian untuk memperbaiki kondisi ekonomi.

Kondisi semacam ini mendorong penduduk pribumi melakukan mobilisasi ke daerah-daerah pusat perkebunan, industri dan terjadinya urbanisasi penduduk sehingga pertumbuhan penduduk di kota Balikpapan semakin pesat. Dampak dari pesatnya pertumbuhan penduduk di Balikpapan ialah munculnya permasalahan sosial seperti hal-hal yang menyangkut pekerjaan, pemukiman, kesehatan dan sebagainya.

C. Pertamina Sebelum dan Sesudah Kemerdekaan

1. Minyak Masa Pendudukan Belanda

a) Awal Mula Industri Minyak

Aeilko Ziljker merupakan tokoh dalam penemuan potensi adanya kandungan minyak bumi di Langkat, Sumatra Utara, yang juga pendiri perusahaan Royal Dutch, perusahaan minyak pertama di Hindia-Belanda yang mengelola produksi, pengilangan, dan pemasaran dari minyak yang dihasilkan. Ziljker, menemukan kandungan minyak bumi di tanah Langkat pada tahun 1883, setelah sebelumnya pada tahun 1871 Jan Reerink melakukan usaha pengeboran minyak di Cibodas, Jawa Barat, namun mengalami kegagalan karena struktur tanah yang lembek.³²

Pusat administrasi perusahaan Royal Dutch berada di Pangkalan Brandan, Sumatera Utara. Pada tahun 1892, Royal Dutch membangun kilang minyak di Pangkalan Susu, beserta fasilitas pelabuhan untuk menampung kapal-kapal tanker yang memasarkan hasil produksi perusahaan. Hasil

³¹ Paul B Horton, Gerald R. Leslie, *The Sociology of Social Problems*, (Appleton-Century-Crofts, 1970), hlm. 97.

³² Anderson G. Bartlett, *op. cit.*, hlm. 44.

komoditi utama yang dihasilkan Royal Dutch adalah minyak tanah yang merupakan bahan bakar penting untuk penerangan.

Perusahaan minyak lain yang datang untuk berinvestasi di Hindia-Belanda adalah *Shell Transport and Trading Co*,³³ perusahaan ini pun mendapat konsesi di Balikpapan yang kemudian dilakukan pendirian instalasi pengilangan minyak. Antara tahun 1901-1902 diadakan perundingan kerjasama oleh Royal Dutch dan Shell, kemudian sepakat membentuk perusahaan patungan bernama *Shell Transport and Royal Dutch Petroleum Company, Ltd*, yang menangani armada tanker dan pemasaran produksi bagi kedua perusahaan.³⁴

Terbentuknya Royal Dutch Shell, maka dibentuk pula anak perusahaan yang memiliki tugas masing-masing. Anak perusahaan tersebut antara lain BPM yang bertugas untuk produksi dan pengilangan, kemudian *Anglo Saxon Petroleum Company* bertugas untuk distribusi produksi, serta mengawasi armada transportasi. Anak perusahaan ketiga adalah *Asiatic Petroleum Company*, yang pada tahun 1946 diubah namanya menjadi *The Shell Petroleum Company* dengan fokus pada bidang pemasaran produksi minyak.³⁵ Tahun 1955 Royal Dutch Shell menyederhanakan sistem struktural operasional mereka, yaitu dengan menggabungkan *Anglo Saxon Company* ke dalam *Shell Petroleum Company*, sehingga hanya terdapat BPM dan Shell Petroleum.³⁶

Peningkatan jumlah permintaan minyak bumi setiap tahun dan kenaikan harga minyak bumi dari tahun ke tahun, membuat eksplorasi minyak di

³³ Perusahaan Shell didirikan oleh Markus Samuel seorang pedagang kulit lokan (kerang) dan rempah-rempah berkebangsaan Inggris. Nama Shell sendiri diambil dari usaha dagang kulit lokannya.

³⁴ John G. Clark, *The Political Economy of World Energy: A Twentieth-Century Perspective*, (London: Harvester Wheatsheaf, 1990), hlm. 35.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Akhmad Ryan, *loc. cit.*

Hindia-Belanda terus dilakukan karena menjadi komoditi utama ekspor yang penting masa itu. Daerah-daerah eksplorasi minyak bumi Hindia-Belanda terdapat di luar Jawa, khususnya Sumatra dan Kalimantan memberikan kontribusi besar bagi ekspor minyak bumi. Suplai minyak mentah yang besar di Kalimantan Tenggara tahun 1910-1930 membuat industri minyak di Balikpapan mengalami peningkatan infrastruktur instalasi minyak.³⁷

b) Perkembangan Industri Minyak di Balikpapan

Pusat penyulingan minyak mentah di Kalimantan Tenggara terletak di Balikpapan. Kilang tersebut menyuling minyak yang berasal dari 3 daerah konsesi minyak di sekitar Balikpapan, yaitu konsesi Mathilda yang terletak di sekitar teluk Balikpapan, konsesi Louise yang terletak di daerah Sanga-Sanga sebelah selatan Samarinda, dan konsesi Nonny yang terletak di sebelah timur konsesi Mathilda. Ketiga konsesi tersebut telah diberikan Kesultanan Kutai dan dimiliki oleh J. H. Menten. Setelah Menten berhasil menemukan sumber minyak di konsesi yang dimilikinya, maka ia menjual haknya atas ketiga konsesi tersebut kepada Shell yang harus memenuhi persyaratan Undang-Undang Pertambangan Minyak di Hindia-Belanda. Shell menunjuk BPM untuk mengurus produksi dan pengilangan di konsesi Louise maupun konsesi Mathilda. Pada tahun 1912 saja, BPM telah memperoleh konsesi baru di wilayah Balikpapan, yaitu konsesi Batakan, konsesi Manggar I dan II, serta konsesi Teritip.³⁸

Penambahan konsesi tersebut membuat BPM menguasai hampir seluruh wilayah Balikpapan, sehingga BPM juga memiliki wewenang untuk mengatur pola pembangunan infrastruktur fisik seperti, wilayah pemukiman, jalan, jalur pipa, kabel telegram, dan telepon yang semuanya digunakan untuk mendukung kepentingan pengembangan industri minyak di teluk Balikpapan. Pada 20 September 1897 mulai diadakan pembangunan kilang minyak di

³⁷ J. Thomas Linblad, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*, (Jakarta: LP3ES, 2000), hlm. 345.

³⁸ Akhmad Ryan, *op. cit.*, hlm. 76.

sekitar wilayah Teluk Balikpapan, dengan bantuan insinyur Madge dan seorang arsitek bernama Richards.³⁹

Dalam meningkatkan hasil produksi serta kualitas minyak dari Balikpapan agar setara dengan kualitas produksi minyak Amerika, maka kilang minyak di Balikpapan melakukan pemasangan serta perluasan instalasi penyulingan baru.⁴⁰ Tahun 1915 pemasangan jaringan pipa berdiameter 5 inchi sepanjang 54 km antara lapangan Louise dengan lapangan Samboja dibangun, pembangunan instalasi baru selesai pada akhir tahun 1915 dan menghasilkan minyak yang berkualitas setara dengan produk minyak Amerika.

2. Nasionalisasi Industri Minyak di Balikpapan

a) Minyak Dalam Penguasaan Jepang

Proses nasionalisasi terhadap industri minyak di Balikpapan merupakan proses yang melibatkan negara, hal ini pun berlangsung lambat karena tak terlepas dari nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terhadap BPM/Shell Indonesia. Adanya pertimbangan nasionalisasi dilakukan karena kilang minyak Balikpapan adalah salah satu aset penting yang dimiliki BPM.

Jepang mendarat di Balikpapan pada 23 Januari 1942, dibawah pimpinan Shizuo Sakaguchi. Pasukan sekutu, termasuk pasukan KNIL Belanda berhasil dikalahkan. Tentara Jepang dan armada lautnya berhasil menguasai kota Balikpapan pada 24 Januari 1942. Hari itu Jepang sudah mulai mengkonsolidasikan kekuasaannya atas kota Balikpapan, pendudukan bagi kota Balikpapan berarti pintu merebut Jawa semakin lebar. Selama pendudukan Jepang, Balikpapan yang dianggap strategis dijadikan pusat kedudukan pemerintah militer Jepang di Kalimantan Timur.⁴¹ Tentu Jepang

³⁹ Humas Kota Balikpapan, *op. cit.*, hlm. 66.

⁴⁰ Akhmad Ryan, *op. cit.*, hlm 83.

⁴¹ Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*, (Jakarta: Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978), hlm. 76.

menguasai dan mengeksplorasi sumber daya alam terutama komoditas penting yang mendukung jalannya Perang Pasifik, yaitu minyak. Sebelumnya, Jepang memperbaiki instalasi minyak yang sudah dibumihanguskan oleh pemerintah Belanda, perbaikan sendiri memakan waktu tiga bulan lamanya.⁴²

Pada Mei 1945, Tarakan berhasil dikuasai kembali oleh tentara sekutu, Jepang yang semula dalam posisi menyerang menjadi bertahan. Serangan udara sekutu pada kedudukan Jepang di Balikpapan semakin intensif dan berhasil menghancurkan hampir seluruh instalasi kilang minyak. Pada Juli 1945 pasukan sekutu, yang didominasi oleh tentara Australia berhasil menguasai Balikpapan, puncaknya Jepang pun menyerah kepada sekutu pada pertengahan Agustus 1945, setelah dua kota di Jepang dihancurkan sekutu melalui udara dengan menjatuhkan bom atom.

b) Dari BPM/Shell Indonesia ke Pertamina

Pada tanggal 3 Desember 1957 terjadi pengambilalihan perusahaan-perusahaan Belanda. Serikat buruh yang tergabung dalam Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) mengambil kedudukan terdepan, perusahaan Belanda yang pertama kali diambilalih adalah *Koninkelijk Paketvaart Maatschappij* (KPM) merupakan perusahaan pelayaran yang memonopoli pelayaran Indonesia. Pengambilalihan KPM kemudian diikuti dengan pengambilalihan bank-bank seperti *Nederlandse Handel Maatschappij*, *Nederlandse Handelsbank* (NHB),⁴³ dilanjutkan pada perusahaan-perusahaan Belanda yang lain. Tahun 1955, perusahaan-perusahaan minyak asing melakukan pergantian nama. BPM sendiri berganti

⁴² Agus Suprapto, *Perang Berebut Minyak: Peranan Strategis Pangkalan Minyak Kalimantan Timur dalam Perang Asia Pasifik 1942-1945*, (Kalimantan Timur: Lembaga Pariwara, 1996), hlm. 199.

⁴³ Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia 1945-1958*, Jilid I, (Jakarta: LPPI, 1991), hlm. 391.

nama menjadi Shell Indonesia. Pergantian dilakukan untuk meredam gejolak dari golongan nasionalis yang tidak menyukai hal-hal yang berbau kolonial.⁴⁴

Adanya Gestapu serta situasi politik yang tidak menentu di Indonesia membuat Shell terpaksa merelakan untuk menghentikan kegiatannya, dengan menjual aset-asetnya.⁴⁵ Bulan Desember 1965 dilakukan penandatanganan serah terima aset Shell Indonesia kepada pemerintah, serah terima ini menandai berakhirnya kegiatan operasi Shell di Indonesia. Setelah aset BPM sudah sepenuhnya menjadi milik pemerintah Indonesia maka untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas tinggi dari apa yang telah dicapai oleh masing-masing perusahaan, pada Agustus 1968 Pemerintah mengintegrasikan PN. Permina dan PN. Pertamin menjadi satu perusahaan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/Tahun 1968, dan diberi nama Perusahaan Negara Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional (PN. Pertamina).⁴⁶ PN Permigan sendiri harus dilikuidir oleh pemerintah, bersamaan dengan munculnya Gerakan 30 September 1965. Tahun 1971 PN. Pertamina diubah menjadi Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara, atau dikenal sebagai Pertamina.⁴⁷

3. Pertamina Unit Pengolahan (UP) V Balikpapan

Lokasi kilang minyak Pertamina UP V Balikpapan tepat di tepi teluk Balikpapan dengan luas area ± 2, 50 hektar yang berdekatan langsung dengan laut, sehingga mempermudah transportasi produk dan bahan baku keluar maupun menuju kilang. Selain itu, sumber air laut sebagai air proses ataupun

⁴⁴ Purnawan Basundoro, “Menjadi Tu(h)an di Rumah Sendiri: Pancaroba Usaha Pertambangan Minyak di Indonesia 1945-1960”, dalam *Lembaran Sejarah* (Vol. 7 No. 1, 2004), hlm 175.

⁴⁵ Anderson G. Bartlett, *op. cit.*, hlm. 276.

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.

utilitas dengan mudah diperoleh. Pemilihan teluk Balikpapan sebagai kawasan kilang dilakukan atas dasar⁴⁸:

- Tersedianya pasokan minyak mentah yang cukup banyak dari kawasan sekitarnya,
- Lokasinya strategis untuk pendistribusian hasil produksi terutama ke kawasan Indonesia Bagian Timur, dan
- Tersedianya sarana pelabuhan untuk kepentingan distribusi minyak mentah dan hasil produksi.

Tahun 1922 kilang minyak Balikpapan I didirikan. Kilang mengalami kerusakan berat karena Perang Dunia II dan pada tahun 1948 kilang direhabilitasi. Pada tahun 1952, unit destilasi⁴⁹ kedua dibangun dan selanjutnya tahun 1954 unit destilasi ketiga dibangun. Unit destilasi I, II, III beserta HVU I (*High Vacuum Unit*) tersebut dikelompokkan menjadi area kilang Balikpapan I. Kilang Balikpapan mengolah total 260 MBSD (*Mega Barrel Stream Day*) minyak mentah.⁵⁰

Kilang Pertamina UP V Balikpapan adalah kilang yang dikhawasukan untuk memenuhi kebutuhan BBM di Indonesia bagian timur. Namun pada kasus-kasus insidental, produksi BBM dari kilang Pertamina UP V Balikpapan juga didistribusikan ke daerah-daerah lain yang juga membutuhkan. Kilang Balikpapan terdiri dari kilang lama dan kilang baru. Pada daerah kilang lama terdiri dari⁵¹:

⁴⁸ Humas Pertamina UP V, *Booklet Pertamina UP V Balikpapan*, (Balikpapan: Humas Pertamina Balikpapan), hlm. 6.

⁴⁹ Destilasi merupakan metode dalam penyulingan minyak untuk memproses minyak mentah agar dapat digunakan menjadi berbagai macam produk. Lihat *ibid* hlm. xv.

⁵⁰ Humas Pertamina Daerah Kalimantan, *Minyak dan Gas Bumi Untuk Kemakmuran Rakyat*, (Balikpapan: Humas Pertamina, 1986), hlm. 13.

⁵¹ *Ibid.*

- Unit Penyulingan Kasar I (PMK I)
- Unit Penyulingan Kasar II (PMK II)
- Unit Penyulingan Hampa I (HVU I)
- Pabrik lilin (*wax plant*)
- *Dehydration plant* (DHP)
- *Effluent Water Treatment Plant* (EWTP)
- *Crude Distillation Unit* V (CDU V)
- *High Vacuum Unit* III (HVU III)

Kilang Balikpapan II (kilang baru) memiliki kapasitas desain 200 MBSD yang terdiri dari⁵²:

- *Hydroskimming Complex* (HSC) yang meliputi:
 - *Crude Distillation Unit IV* (CDU IV), *Plant 1*
 - *Naptha Hydrotreater* (NHT), *Plant 4*
 - *Platformer Unit*, *Plant 5*
 - *LPG Recovery Unit*, *Plant 6*
 - *Sour Water Stripper Unit* (SWS), *Plant 7*
 - *LPG Treater Unit*, *Plant 9*
- *Hydrocracking Complex* (HCC) yang meliputi:
 - *High Vacuum Unit II* (HVU II), *Plant 2*
 - *Hydrocracking Unibon* (HCU II), *Plant 3*
 - *Hydrogen Plant*, *Plant 3*
 - *Hydrogen Recovery Plant*, *Plant 38*
 - *Flare Gas Recovery*, *Plant 19*

4. Tenaga Kerja dan Struktur Organisasi Pertamina UP V Balikpapan

Pertamina memiliki tenaga kerja dan sistem organisasi dimana para staf dibagi atas cabang-cabang berdasarkan regionalnya. Tenaga kerja lapangan pada Pertamina UP V mencapai 544 orang yang terbagi ke dalam beberapa kelompok umur. Berikut tabel gambaran umum tenaga kerja berdasarkan kelompok umur.

⁵² *Ibid*, hlm. 15.

Tabel 3
Distribusi Umur Tenaga Kerja Pertamina UP V Balikpapan 1975

NO	Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah Tenaga Kerja	Percentase (%)
1	20-25	90	11
2	26-31	265	31
3	32-37	190	23
4	38-43	102	12
5	44-49	102	12
6	50-59	97	11
Total		844	100

Sumber: Fendi Hardianto, *Laporan Kerja Praktek Pertamina UP V Balikpapan 1995*, (Malang: Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang), hlm. 45.

Struktur organisasi Pertamina UP V Balikpapan berada di bawah wewenang dan tanggung jawab *General Manager* UP V (GM UP V), yang bertanggung jawab langsung kepada Direktur Unit Pengolahan Pertamina. GM Pertamina UP V berfungsi sebagai koordinator seluruh kegiatan pengolahan Pertamina di Balikpapan, yang tugasnya dibantu oleh beberapa *Manager/Kepala Bidang*.

D. Pengaruh Pertamina Terhadap Sebagian Kehidupan Kota Balikpapan

Industri minyak di Balikpapan yang sudah ada sejak masa kolonial memberikan dampak langsung bagi kota, seperti keadaan kota, penduduknya, dan ekonomi masyarakat. BPM, perusahaan yang mengerjakan proses kegiatan dan pengolahan minyak di nusantara saat itu saja membutuhkan banyak pegawai atau buruh dari masyarakat pribumi. Untuk memenuhi kebutuhan kerja yang terus meningkat seiring peningkatan permintaan

minyak olahan serta perluasan kapasitas industri minyak, BPM mendirikan sekolah pertukangan perusahaan di Balikpapan pada tahun 1950 untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terdidik, sekolah yang sama juga didirikan di Plaju.⁵³ Syarat yang harus dipenuhi masyarakat khususnya masyarakat pribumi untuk masuk ke sekolah ini adalah:⁵⁴

1. Minimal telah lulus dan menempuh 6 tahun sekolah rakyat.
2. Diutamakan bagi pemuda yang berusia 15 sampai 19 tahun.
3. Mendapat surat keterangan kesehatan dari dokter BPM bahwa kesehatan jasmani sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.
4. Lulus ujian penjaringan.

Keadaan sosial masyarakat Kota Balikpapan pun juga semakin berkembang, seiring adanya arus migrasi yang terjadi. Arus migrasi yang terjadi di Kota Balikpapan memunculkan hal baru dalam masalah kependudukan. Kendati ledakan penduduk tidak besar, namun arus pendatang dari luar Balikpapan cukup besar. Kebanyakan mereka para pendatang berasal dari Pulau Jawa dan pulau lain di Indonesia dengan berbagai macam etnis. Mereka para pendatang menganggap bahwa keadaan ekonomi di Balikpapan menarik mereka untuk mengadu nasib di Kota Balikpapan.

Arus migrasi yang terjadi di Kota Balikpapan dikarenakan adanya faktor dari daerah asal, faktor dari daerah tujuan migrasi, dan faktor pribadi. Faktor daerah asal mempengaruhi mereka untuk pindah ke Balikpapan, karena mereka masih menganggap kurangnya lapangan kerja di daerah asal yang belum menjamin kehidupan ekonominya.⁵⁵ Menurut data yang tersedia, adanya anggapan bahwa peluang kerja di Kota Balikpapan masih cukup besar, selain itu provinsi Kalimantan Timur dikenal sebagai daerah kaya

⁵³ Humas BPM, *Pendidikan dan Pengajaran pada BPM di Indonesia*, (Jakarta: SENO N.V, 1955), hlm. 4.

⁵⁴ *Ibid*, hlm. 5.

⁵⁵ Ucik Purnamasari, *Profil Keadaan Ekonomi, Kondisi Perumahan, dan Status Kesehatan Migran dan Non Migran Kota Balikpapan 1970-1990*, (Jakarta: STIS, 2007), hlm. 49.

sumber daya alam, sehingga banyak menarik para pendatang masuk. Arus migrasi yang disebabkan oleh faktor pribadi, menyebutkan keinginan mereka untuk ikut pindah ke Balikpapan berasal dari keikutsertaan mereka menyusul keluarga yang lebih dulu tinggal dan bekerja di Kota Balikpapan. Pada data yang diterbitkan langsung oleh Biro Pusat Statistik, menunjukkan angka migrasi yang masuk di Kota Balikpapan tahun 1975 adalah sebesar 2.056 orang, jauh berbeda pada tahun sebelumnya, 1974 yang hanya mencapai 1.789 orang. Pembukaan lahan pekerjaan baru di Balikpapan terlepas dari pekerjaan sebagai buruh minyak menjadi salah satu faktor peningkatan jumlah penduduk.

Suku atau etnis yang paling dominan berada di Balikpapan adalah Suku Bugis, mereka tinggal secara berkelompok di beberapa daerah seperti Kampung Baru, Manggar, Karang Jawa, Karang Bugis, dan Karang Anyar. Orang-orang keturunan Jawa sendiri banyak bermukim di wilayah Karang Rejo dan Sumberejo, sisanya adalah orang-orang Banjar yang tersebar di beberapa wilayah di Balikpapan, sedangkan untuk penduduk campuran yang terdiri dari banyak etnis atau suku berada di wilayah seperti Gunung Sari, Gunung Malang dan Gunung Pasir. Meski banyak suku atau etnis yang tinggal di Balikpapan, paling tidak telah terjadi pembauran diantara penduduk Balikpapan dan menjadikan kota itu heterogen.⁵⁶

Mata pencaharian atau pekerjaan di Balikpapan sendiri nampak berkelompok, khususnya dalam hal perdagangan. Perdagangan sayur dan makanan biasa didominasi oleh orang-orang Jawa. Perdagangan kayu dilakukan oleh orang Madura, perdagangan ikan banyak dilakukan oleh orang-orang Bugis, kemudian perdagangan pakaian (sandang) biasa dilakukan orang-orang Banjar. Sementara untuk posisi pegawai pemerintahan

⁵⁶ Petrik Matanasi, *Kilas Balik Kota Yang (Diperebutkan) Bernama Balikpapan*, naskah tulisan awal tentang sejarah kota Balikpapan yang dipersembahkan untuk memperingati HUT Kota Balikpapan, 10 Februari 2008.

maupun perusahaan swasta umumnya adalah campuran, tidak ada dominasi etnis dalam instansi manapun di Kota Balikpapan.⁵⁷

Hubungan Pertamina dengan masyarakat umum Kota Balikpapan ditunjukkan dengan pemberian bantuan dana untuk pembangunan dan fasilitas rumah-rumah ibadah. Pada tanggal 21 Februari 1973, Pertamina menyerahkan sumbangan uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk pembangunan kubah Masjid Al-Amin yang berada di daerah Kebun Sayur, Kelurahan Baru Ilir. Pimpinan Umum Pertamina UP V Idrus Sjahrial saat itu menyatakan bahwa sumbangan tersebut diberikan oleh Pertamina mengingat akan pentingnya pembangunan rumah ibadah sebagai tempat wujud spiritual masyarakat. Pertamina mengaku akan selalu memberikan bantuan sumbangan terutama untuk pembangunan di daerah, namun hal tersebut hanya dapat diberikan sesuai dengan batas kemampuan dan wewenang yang ada.⁵⁸

Selain pemberian dana untuk pembangunan masjid, sebelumnya Pertamina juga memberikan bantuan yang sama untuk rumah-rumah ibadah lainnya, yaitu sumbangan sebesar Rp. 500.000,- yang masing-masing diberikan untuk Gereja Bethel di Gunung Malang dan Gereja Advent di daerah Gunung Pasir. Harapan yang ada, pemberian digunakan dan dimanfaatkan dengan baik, demi terlaksananya pembangunan daerah di Kota Balikpapan.⁵⁹ Operasi perminyakan dan perkayuan di Kaltim merupakan faktor penunjang yang diharapkan secara positif dapat membantu perkembangan pembangunan daerah.

Sebagai perusahaan minyak nasional yang memproduksi maupun mengolah minyak mentah di kota Balikpapan juga memberikan keuntungan bagi pemerintah kota untuk keseluruhan kehidupan masyarakatnya. Hal ini dapat dilihat dari kebutuhan air minum dan air bersih untuk Kota Balikpapan.

⁵⁷ *Ibid.*

⁵⁸ “Pertamina Sumbang Rumah-Rumah Ibadah” dalam *Warta Pertamina*, No. 11, Tahun VII, April, 1973, hlm. 21.

⁵⁹ *Ibid.*

Kebutuhan akan air minum dan air bersih disuplai oleh Pertamina yang telah memanfaatkan air Sungai Wain, dengan kapasitas $5.115 \text{ m}^3/\text{hari}$.⁶⁰

Penggunaannya dibagi menjadi 2 sektor yaitu:

- Sektor Pertamina	3.893 m^3	75%
- Sektor Kodya (umum)	1.105 m^3	21,62%
Jumlah penggunaan	4.994 m^3	96,62%

Urusan air minum kota diurus oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Balikpapan yang langsung dibawah Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kota Balikpapan. Luas daerah wewenang 2.250 km^2 dengan jumlah langganan sebanyak 491. Pihak PDAM membeli kepada Pertamina kemudian didistribusikan kepada masyarakat atas dasar sewa.⁶¹

Keuntungan Pemerintah Kota Balikpapan yang diperoleh dari adanya Pertamina dapat dilihat dari pemanfaatan dalam pembangunan kota dengan usaha pembangunan ekonomi kota masa itu. Dalam setiap kesempatan, beberapa putra daerah dapat dididik dalam lingkup pekerjaan teknik, yang dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi permasalahan teknologi daerah khususnya berkaitan dengan kesejahteraan hajat hidup masyarakat Kota Balikpapan.⁶²

Pemerintah Kota juga bekerjasama dengan Pertamina untuk mengurus pelabuhan. Daerah pelabuhan Balikpapan terletak dibagian barat dari kota Balikpapan memanjang dari arah selatan ke utara sampai ke Kampung Baru. Sesuai dengan persetujuan bersama Dirjen Perhubungan Laut dan Dirut Pertamina tentang hak-hak dan kewajiban Pertamina dipelabuhan khusus, dan adanya realisasi penandatanganan perjanjian serah terima pengelolaan pelabuhan khusus Balikpapan oleh administrator Pelabuhan Balikpapan kepada Pertamina Unit IV di Balikpapan, maka pengelolaan pelabuhan dibagi menjadi 2, yaitu pelabuhan khusus minyak Pertamina, dan pelabuhan yang

⁶⁰ Research Teknik UGM, *op.cit.*, hlm. 133.

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*, hlm 128.

diusahakan oleh Badan Pengusahaan Pelabuhan Balikpapan, untuk distribusi barang dan penumpang.⁶³

E. Kesimpulan

Pada Desember 1965 dilakukan penandatanganan serah terima aset-aset Shell Indonesia kepada pemerintah, hal ini dilakukan Shell atas adanya Gestapu dan situasi politik yang tak menentu di Indonesia. Serah terima ini menandai berakhirnya kegiatan operasi Shell di Indonesia. Adanya SK Deputi Menteri Urusan Minyak dan Gas Bumi No. 158/DM/Migas/66 yang menyebutkan untuk membubarkan pimpinan sementara ex Shell Indonesia. Pimpinan ex Shell Indonesia kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawab untuk menjalankan perusahaan kepada Permina diikuti penggabungan seluruh bagian teknis lapangan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 27/Tahun 1968, PN Permina dilebur dengan PN Pertamin dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, serta diberi nama menjadi PN Pertamina. Tahun 1971 sesuai UU No. 8 PN Pertamina berganti menjadi Pertamina.

Lokasi kilang minyak Pertamina UP V Balikpapan sendiri terletak di tepi teluk Balikpapan yang berdekatan langsung dengan laut, sehingga mempermudah transportasi produk dan bahan baku keluar maupun menuju kilang. Pemilihan teluk Balikpapan sebagai kawasan kilang dilakukan atas dasar tersedianya pasokan minyak dari kawasan sekitar, strategis untuk pendistribusian hasil produksi, dan adanya sarana pelabuhan.

Kilang Pertamina UP V Balikpapan, terdiri dari kilang Balikpapan I, dan kilang Balikpapan II. Masing-masing kilang memiliki unit masing-masing untuk memperoleh hasil produksi yang maksimal. Kilang Balikpapan di desain untuk mengolah minyak mentah yang berasal dari berbagai lapangan minyak lokal seperti lapangan minyak Attaka, Badak, Bekapai, Handil, Sepinggan, dan Tanjung.

⁶³ *Ibid.*, hlm 25.

Keberadaan Pertamina di Kotamadya Balikpapan memberikan pengaruh langsung bagi kota seperti keadaan kota, penduduk, maupun ekonominya. Pihak Pertamina juga menjalin hubungan yang baik dengan masyarakat dan pemerintah setempat. Adanya sekolah pertukangan perusahaan khusus bagi calon ahli minyak didirikan untuk memenuhi kebutuhan kerja yang terus meningkat seiring peningkatan permintaan minyak.

Pengaruh Pertamina bagi perkembangan penduduk adalah timbulnya arus migrasi, hal ini karena kebutuhan Pertamina untuk mencari tenaga minyak/buruh minyak. Mereka yang datang juga tidak hanya sebagai buruh minyak, melainkan juga melakukan usaha berdagang. Migrasi berasal dari luar Balikpapan khususnya Pulau Jawa, sisanya pulau lain di Indonesia dengan berbagai macam etnis. Akibat migrasi dari berbagai daerah di Indonesia tersebut, memunculkan keberagaman etnis dan suku di Balikpapan yang hidupnya berkelompok sesuai asal mereka.

Hubungan Pertamina dengan masyarakat umum Kota Balikpapan ditunjukkan dengan pemberian bantuan dana untuk pembangunan dan fasilitas rumah-rumah ibadah. Pertamina dengan Pemerintah Kota Balikpapan juga memiliki hubungan kerjasama yang baik, seperti pengadaan kebutuhan air bersih untuk masyarakat, dan perjanjian mengenai pengelolaan pelabuhan.

F. DAFTAR PUSTAKA

Agus Suprapto, *Perang Berebut Minyak: Peranan Strategis Pangkalan Minyak Kalimantan Timur dalam Perang Asia Pasifik 1942-1945*. Kalimantan Timur: Lembaga Pariwara, 1996.

Akhmad Ryan, *Industri Minyak Balikpapan: Dalam Dinamika Kepentingan Sejak Pendirian Hingga Proses Nasionalisasi*. Malang: Universitas Negeri Malang Press, 2012.

Amiruddin Maula, *Cerita Rakyat Dari Kalimantan Timur*. Jakarta: Grasindo, 1994.

- Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, *Balikpapan Dalam Angka 2012*. Balikpapan: Bappeda Balikpapan, 2012.
- Bartlett, Anderson G, *PERTAMINA: Perusahaan Minyak Nasional*, terj. Mara Karma. Jakarta: Inti Idayu Press, 1986.
- Clark, John G, *The Political Economy of World Energi: A Twentieth-Century Perspective*. London: Harvester Wheatsheaf, 1990.
- Depdikbud, *Sejarah Kebangkitan Nasional Daerah Kalimantan Timur*. Jakarta: Proyek Penelitian Kebudayaan Daerah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1978.
- Fendi Hardianto, *Laporan Kerja Praktek Pertamina UP V Balikpapan 1995*. Malang: Jurusan Teknik Mesin Universitas Muhammadiyah Malang, 1995.
- Gottschalk, Louis, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1985.
- Horton, Paul B, Gerald R. Leslie, *The Sociology of Social Problems*, Appleton-Century-Crofts, 1970.
- Humas BPM, *Pendidikan dan Pengajaran Pada BPM di Indonesia*. Jakarta: SENO N. V, 1955.
- Humas Kota Balikpapan, *90 Tahun Kota Balikpapan*. Balikpapan: Humas Pemerintah Kota Balikpapan, 1987.
- Humas Pertamina Daerah Kalimantan, *Minyak dan Gas Bumi Untuk Kemakmuran Rakyat*. Balikpapan: Humas Pertamina, 1986.
- Humas Pertamina UP V, *Booklet Pertamina UP V Balikpapan*. Balikpapan: Humas Pertamina Balikpapan.
- Lembaran Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.
- Linblad, J. Thomas, *Sejarah Ekonomi Modern Indonesia: Berbagai Tantangan Baru*. Jakarta: LP3ES, 2000.
- Mahyuzar, M, *Administrasi, Transportasi, dan Pusat Perdagangan: SDA dan Sosial Budaya Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur*. Semarang: Penerbit Aneka Ilmu, 2009.
- Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina: Dilema Antara Orientasi Bisnis dan Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Galang Press Group, 2000.

- Nugroho Notosusanto, *Norma-norma dan penulisan Sejarah*. Jakarta: Dephankam, 1997.
- Oey Beng To, *Sejarah Kebijakan Moneter Indonesia 1945-1958, Jilid 1*. Jakarta: LPPI, 1991.
- Onghokham, *Anti Cina, Kapitalisme Cina dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*. Jakarta: Komunitas Bambu, 2008.
- Penerbit Buku Kompas, *Profil Daerah Kabupaten dan Kota*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Purnawan Basundoro, “Menjadi Tu(h)an di Rumah Sendiri: Pancaroba Usaha Pertambangan Minyak di Indonesia 1945-1960”, dalam *Lembaran Sejarah*, Vol. 7, No. 1, 2004, hlm. 173-195.
- Research Teknik UGM, *Pelabuhan Balikpapan* (bentuk mikrofilm). Kompilasi Data; Jakarta: Library of Congress Office; Washington DC: Library of Congress Photoduplication Service, 1990.
- Salladien, *Buku Kependudukan Konsep Dasar Demografi*. Surabaya: Bina Ilmu, 1980.
- Shell Indonesia. *Pladju: Pusat Kegiatan Minjak di Sumatera*, (Jakarta: Gita Karya, 1960).
- Tim Penyusun, *Kalimantan Timur: Profil Provinsi Republik Indonesia*. Jakarta: Yayasan Bakti Nusantara, 1994.
- Ucik Purnamasari, *Profil Keadaan Ekonomi, Kondisi Perumahan, dan Status Kesehatan Migran dan Non Migran Kota Balikpapan 1970-1990*. Jakarta: STIS, 2007.
- Warta Pertamina, “Pertamina Sumbang Rumah-Rumah Ibadah”, No. 11, Tahun VII, April, 1973, hlm. 21.